

Analisis Potensi Praktek Penguasaan Pasar dan Diskriminasi oleh PT Angkasa Pura I terkait Operasional Taksi di Bandara Sultan Hasanuddin Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 (Perkara No. 23/KPPU-L/2020). = Analysis of the Potential Market Dominance and Discrimination Practice by PT Angkasa Pura I regarding Taxi Operations at Sultan Hasanuddin Airport Reviewed from Law No. 5 of 1999 (Case No. 23/KPPU-L/2020).

Athaya Naila Ayasha Trishadiatmoko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527969&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, harus ada peraturan yang mengatur persaingan usaha. Di Indonesia, UU No. 5 tahun 1999 mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ini muncul karena banyaknya kasus praktek monopolidan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti bisnis di Indonesia yang dikuasai oleh keluarga konglomerat atau pihak-pihak tertentu yang menyingkirkan usaha kecil. Larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah larangan penguasaan pasar dan larangan diskriminasi usaha. Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pengoperasian taksi di Bandara Sultan Hasanuddin oleh PT Angkasa Pura I, dimana terdapat laporan dugaan yang disampaikan oleh Blue Bird Group terhadap PT Angkasa Pura I terkait pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindakan PT Angkasa Pura I dan menjadikannya sebagai terlapor, dan telah memulai persidangan hingga pada tahap tanggapan dari terlapor. Namun, terlapor kemudian membuat pakta integritas perubahan perilaku yang menyatakan bahwa terlapor mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku yang dituduhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan terlapor melanggar Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999 dan dampak hukum dari tindakan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PT Angkasa Pura I, dari pendekatan rule of reason, tidak melanggar pasal yang dituduhkan oleh terlapor dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan mereka membantu operator taksi lain di bandara dan menimbulkan dampak positif.

.....In order to create a healthy business environment, there must be regulations governing business competition. In Indonesia, Law No. 5 of 1999 governs the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this regulations arose due to the numerous instances of monopolistic and deceptive business practices, for instance, Indonesian businesses being controlled by conglomerate families or certain parties where they exclude small businesses. Prohibitions stated in the law are prohibition on market dominance and prohibition on business discrimination. It relates to the case that will be discussed in this thesis regarding taxi operations in Sultan Hasanuddin Airport by PT Angkasa Pura I, where a report of allegations are submitted by Blue Bird Group towards PT Angkasa Pura I regarding the violation of Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 on market dominance and discrimination. KPPU then investigated PT Angkasa Pura I's act, making them the reported party, and has started the trial until the stage of response from the reported party. However, the reported party then made a change of behavior integrity pact, stating that they acknowledge their wrongdoings and committed to changing their alleged behavior. This research

uses the juridical-normative method and is to determine whether the reported party's action violated Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 and the legal impacts of their action. This thesis concludes that PT Angkasa Pura I, from the rule of reason approach, did not violate the alleged article from the report and the legal impacts caused by their action helps other taxi operators at the airport and caused a positive impact.